

Bab V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kesimpulan yang diperoleh yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi sistem pembayaran non-tunai berupa KKP dan CMS VA di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM belum optimal, dengan penggunaan yang masih relatif rendah. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni faktor komitmen pimpinan, faktor sumber daya manusia, faktor ketersediaan SOP, faktor mekanisme *reward and punishment*, serta faktor keterlibatan pihak Bank.

a. Faktor Komitmen Pimpinan

Belum adanya komitmen pimpinan yang cukup tinggi dalam implementasi sistem pembayaran non-tunai. Hal ini tercermin dari beberapa kondisi, antara lain format perjanjian kerjasama pengelolaan KKP yang belum mengikuti format terstandarisasi dari Kemenkeu, belum tersedianya SOP, belum tersedianya mekanisme *reward and punishment*, serta belum tersedianya pengawasan internal yang cukup memadai terhadap pengelolaan kedua instrumen non-tunai tersebut.

b. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Kapasitas SDM manajemen pengguna KKP maupun CMS VA di internal Satker belum cukup optimal. Hal ini dapat terlihat dari berbagai permasalahan yang masih kerap ditemui di lapangan. Kesalahan administrasi pertanggungjawaban kegiatan, kekeliruan pembebanan tagihan KKP, keterlambatan memproses administrasi pertanggungjawaban dan pembayaran tagihan, serta belum terpenuhinya prosedur persetujuan perubahan limit KKP dan persetujuan pendebitan rekening dari CMS VA. *Mindset* pegawai yang masih cukup sulit beralih ke sistem non-tunai harus betul-betul menjadi *concern* dari pimpinan.

c. Faktor Ketersediaan *Standar Operating Procedure* (SOP)

Satker belum memiliki SOP pengelolaan KKP maupun CMS VA sebagai standar baku dalam bekerja sehingga belum tersedia pengaturan secara lebih mendetil. Pengaturan ini diperlukan guna meminimalisir berbagai permasalahan yang masih sering terjadi di lapangan.

d. Faktor Mekanisme *Reward and Punishment*

Satker belum menerapkan mekanisme *reward and punishment* dalam pengelolaan KKP maupun CMS VA. dimana hal ini terlihat dari kondisi belum adanya aturan yang mewajibkan penggunaan instrument non-tunai, belum terdapat sanksi yang diterapkan atas penyalahgunaan penggunaan, keterlambatan penyampaian pertanggungjawaban dan pembayaran tagihan, serta belum adanya apresiasi atau *reward* terhadap penggunaan KKP maupun CMS VA yang sudah baik dan melebihi target.

e. Faktor Keterlibatan Pihak Bank

Meskipun kerjasama yang terjalin dengan pihak Bank selama ini berjalan dengan relatif baik namun beberapa fakta di lapangan seperti terjadinya *double pembebanan* oleh pihak Bank atas satu transaksi yang sama, pengenaan biaya *surcharge* oleh *merchant*, proses perubahan limit KKP diluar jam kerja yang cukup lama, hingga kasus *cybercrime* yang belakangan ini menimpa dua Satker, mengindikasikan layanan yang diberikan pihak Bank belum cukup optimal.

2. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan kelemahan dalam implementasi sistem pembayaran non-tunai di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM. Suatu model dirumuskan guna mengoptimalkan penggunaan KKP dan CMS VA dalam mekanisme pembayaran belanja negara yang dilakukan oleh Satker. Model memasukkan komitmen pimpinan sebagai faktor yang paling memengaruhi penerapan *cashless payment system*. Faktor komitmen pimpinan juga memengaruhi faktor SDM, faktor ketersediaan SOP, faktor mekanisme *reward and punishment*, dan faktor keterlibatan pihak Bank. Pengelolaan faktor-faktor menuntut sinergi yang kuat antara organisasi dan manajamen

pengguna instrument non-tunai. Dengan demikian setiap tahapan implementasi pengelolaan KKP dan CMS VA yang dimulai sejak tahap penandatanganan kerjasama antara Satker dengan pihak Bank, penerbitan dan penyerahan instrument, transaksi penggunaan dan pertanggungjawaban, hingga tahap pengawasan dan monitoring evaluasi dapat berjalan dengan lebih baik lagi sehingga dapat berdampak pada optimalnya sistem pembayaran non-tunai di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.

B. Saran

Berdasarkan simpulan hasil penelitian, peneliti menyarankan beberapa perbaikan terhadap penerapan faktor yang diharapkan dapat mengoptimalkan implementasi sistem pembayaran non-tunai dengan meningkatkan penggunaan KKP dan CMS VA.

1. Terkait faktor-faktor yang memengaruhi penerapan sistem pembayaran non-tunai:
 - a. Faktor Komitmen Pimpinan
 - i. Memperbarui perjanjian kerjasama pengelolaan KKP antara Satker dengan Bank Penerbit KKP sesuai format yang terstandarisasi pada PMK terkait.
 - ii. Menyusun *policy brief* untuk kemudian disampaikan kepada Menteri guna memperoleh dukungan terhadap pentingnya implementasi sistem pembayaran non-tunai pada mekanisme pembayaran belanja Kementerian.
 - iii. Menerbitkan Nota Dinas Kuasa Pengguna Anggaran guna mendorong kewajiban penggunaan KKP oleh para pegawai maupun CMS VA oleh Bendahara, pada akun belanja tertentu seperti akun 521111 Belanja Keperluan Perkantoran, akun 521811 Belanja Persediaan, serta akun 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa.
 - iv. Menerbitkan Nota Dinas Kuasa Pengguna Anggaran guna mendorong/mengimbau komunitas UKM binaan Kementerian untuk mendaftarkan diri menjadi penyedia barang/jasa pada aplikasi *marketplace* pemerintah, Digipay.

- v. Menetapkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran terkait pembentukan tim pemantauan dalam mengantisipasi dan memitigasi risiko yang berpotensi muncul dalam penggunaan KKP maupun CMS VA.
- b. Faktor Sumber Daya Manusia
 - i. Bagian Keuangan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, *refreshment* ataupun bimbingan teknis yang ditujukan untuk pengelola keuangan maupun pengguna instrument non-tunai pada masing-masing Satker.
 - ii. Bagian Keuangan mendorong pemanfaatan e-learning atau pelatihan jarak jauh bagi para pegawai maupun pengelola keuangan, yang disediakan oleh Kemenkeu melalui laman Kemenkeu Learning Center (<https://klc2.kemenkeu.go.id/>), diantaranya seperti *microlearning* pengelolaan Uang Persediaan dalam KKP, *microlearning* studi kasus perpajakan atas transaksi dengan KKP, *microlearning* studi kasus pengujian belanja perjalanan dinas menggunakan KKP, dan *microlearning virtual account*.
 - iii. Bagian Keuangan menginisiasi penyelenggaran kegiatan *forum group discussion* secara berkala sebagai wadah berbagi pengalaman antar para pengguna instrument non-tunai, khususnya terkait kendala-kendala yang kerap ditemui dalam penggunaannya.
- c. Faktor Ketersediaan SOP
 - i. Bagian Keuangan pada Unit Eselon I menyusun SOP sebagai acuan dalam mengelola penggunaan KKP dan CMS VA, dengan melibatkan manajemen pengguna dari seluruh Satker .
 - ii. Setiap Satker berkewajiban untuk melakukan sosialisasi dan evaluasi SOP secara berkala, bagi pengelola keuangan maupun pengguna KKP dan CMS di internal Satker.
- d. Faktor Mekanisme *Reward and Punishment*
 - i. Pimpinan Unit Eselon I membangun mekanisme *reward and punishment* bagi para pengguna maupun Satker. Pemberian *reward* atau apresiasi diberikan bagi mereka

yang memiliki transaksi penggunaan KKP dan CMS VA tertinggi, misalnya berupa piagam penghargaan ataupun *acknowledgement* pada *social media* Kementerian. Sementara *punishment* atau sanksi diberikan kepada mereka yang belum memanfaatkan KKP dan CMS VA pada kurun waktu tertentu, atau belum mencapai target realisasi bulanan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selama dua bulan berturut-turut. Sanksi yang diberikan dapat berupa surat teguran.

- ii. Pimpinan Unit Eselon I melakukan evaluasi terhadap mekanisme *reward and punishment* yang sedang berjalan, untuk mengukur dampak mekanisme tersebut terhadap optimalisasi penggunaan instrument non-tunai.

e. Faktor Keterlibatan Pihak Bank

- i. Pihak Bank memperbarui perjanjian kerjasama pengelolaan KKP antara Satker dengan Bank Penerbit KKP yang mengatur poin-poin mengenai keterlibatan bank dalam pemanfaatan KKP dan CMS VA oleh satker.
- ii. Pihak Bank menyelenggarakan kegiatan *forum group discussion* secara berkala untuk meningkatkan koordinasi antara Satker dengan Bank dalam pengelolaan KKP dan CMS VA.
- iii. Pihak Bank menyediakan layanan dan pengaduan 24 jam khususnya terkait pengajuan perubahan limit KKP yang menjadi kebutuhan utama Satker, serta untuk mengantisipasi berbagai kendala teknis yang kerap ditemui di lapangan.
- iv. Pimpinan Satker mendorong pihak Bank untuk segera menyediakan aplikasi daring (*dashboard*) untuk memantau seluruh penggunaan KKP secara *real-time*.
- v. Pimpinan unit Eselon I mendorong pihak Bank untuk membuat laporan dan analisis secara berkala atas penggunaan KKP maupun CMS VA di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM.

2. Terkait output penelitian dan penelitian selanjutnya

Pelaksanaan implementasi sistem pembayaran non-tunai di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM dapat mengacu pada model sistem pembayaran non-tunai terintegratif yang dikembangkan oleh peneliti. Penerapan model dimaksud sangat bergantung pada peran pimpinan dalam mendorong seluruh pihak untuk bersama-sama melakukan perbaikan manajemen kas pada lingkupnya. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam proses analisis dan validasi data. *Key informant* yang digunakan pada penelitian ini masih terbatas pada pengelola keuangan dan pengguna instrument non-tunai pada Satker Pusat. Untuk analisis data yang lebih mendalam, pemilihan *key informant* dapat melibatkan pengelola keuangan dan pengguna instrument non-tunai pada Satker Dekonsentrasi di daerah. Belum dilakukan proses validasi data melalui kegiatan *Focus Group Discussion* atau diseminasi. Oleh karena itu, untuk memperoleh hasil yang lebih valid, maka dalam penelitian selanjutnya dapat dilakukan proses validasi melalui kegiatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bayan, A. Y. (2022). Tinjauan atas Pelaksanaan Pembayaran Menggunakan Uang Persediaan Melalui Kartu Kredit Pemerintah di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Bengkulu (Doctoral Dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN). <http://eprints.pknstan.ac.id/id/eprint/1385>.
- Anindita, G., & Santoso, F. I. (2022). Implementasi Cash Management System (CMS) dalam Belanja Daerah di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman. In Proceeding of National Conference on Accounting & Finance (pp. 420-425). <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art52>.
- Arfandi, A., Ismail, I., & Aminah, S. (2022). Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Wajo. *Jurnal Ada Na Gau: Public Administration*, 3(1), 820-833.
- Armin, Sahila Kusminaini. 2018. "Analisis Siklus Pengeluaran Uang Persediaan (UP) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP B Palembang." *Jurnal Kompetitif* 7(2): 77–94. DOI: <http://dx.doi.org/10.52333%2Fkompetitif.v7i2.461>.
- Arsyati, A., Darwanis, D., & Djalil, M. A. (2008). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Keuangan terhadap Kualitas Pertanggungjawaban Keuangan PNBP dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Instansi pada Universitas Syiah Kuala. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, 1(1), 29-49.
- Astri Tania Herlen, Vima Tista Putriana, Denny Yohana, 2021. Implementasi Kebijakan Transaksi Non Tunai Pemerintah Daerah di Indonesia, Fakultas Ekonomi Pascasarjana Akuntansi, Universitas Andalas, Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(1), Februari 2021, 80-85. DOI: <http://dx.doi.org/10.33087/jiuj.v21i1.1235>.
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10(1), 46-62. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/139619>.
- Bambang, A. S. (2014). Perbedaan model dan teori dalam ilmu komunikasi. *Humaniora*, 5(2), 1153-1160.
- Bareta, R. D., Ispriyarto, B., & Utama, K. W. (2018). Mekanisme Penggunaan Uang Persediaan dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah melalui Belanja Online (Suatu Kajian dari Aspek Hukum Keuangan Negara). *Law Reform*, 14(1), 29-41. <https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20234>.
- Bintarto, E.A. (2018). Fintech dan Cashless Society : Sebuah Revolusi Pendongkrak Ekonomi Kerakyatan. Surabaya : Universitas Airlangga. <https://himma.maksi.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/428/2018/10/Essay-Booklet-Access18.pdf>.
- Buku Pintar Kartu Kredit Pemerintah Jilid 2. 2019. Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. <https://djpdb.kemenkeu.go.id/kppn/bitung/id/panduan/implementasi-kkp/3167-buku-pintar-kkp.html>.

- Daly, J.L. and Buehner, M.A. (2017), "P-card utilization in municipal government: advantages and concerns", *Journal of Public Procurement*, Vol. 3 No. 1, pp. 75-94. <https://doi.org/10.1108/JOPP-03-01-2003-B004>.
- Davici, Nadia (2018). Pengaruh Tekanan Eksternal, Komitmen Pimpinan dan Faktor Politik terhadap Transparansi Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Agam). Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNP. Vol 6, No.1. <https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2766>.
- Elmizar, E., & Kasmadi, K. (2020). Analisis Implementasi Sistem Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar). *Jurnal Riset Manajemen Indonesia*, 2(3), 149–157. <https://doi.org/10.55768/Jrmi.V2i3.32>.
- Goedhart, C.Garis-Garis Besar Ilmu Keuangan Negara (R.12/H) / C. Goedhart .1987. digilib.fisipol.ugm.ac.id.
- Husain, F. (2022). Efektivitas Kartu Kredit Pemerintah dalam Rangka Modernisasi Belanja Negara melalui Mekanisme Uang Persediaan (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi Indonesia Jakarta). <http://repository.stei.ac.id/id/eprint/8830>.
- Ichwan, M.. (1989). Administrasi Keuangan Negara: Suatu Pengantar Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) M. Ichwan . Yogyakarta: Liberty. https://psb.feb.ui.ac.id/index.php?p=show_detail&id=42854&keywords=
- <https://djpdb.kemenkeu.go.id/kanwil/ntt/id/profil/309-lkpp/2886-umkm-goes-digital.html>.
- <https://megapolitan.antaranews.com/berita/261213/pemkab-karawang-perkenalkan-penerapan-sistem-pembayaran-nontunai-produk-umkm>.
- <https://djpdb.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta4/id/data-publikasi/pengumuman/2952-draft-perjanjian-kerja-sama-pks-antara-satuan-kerja-dan-bank-penerbit-kartu-kredit-pemerintah-kkp.html>.
- <https://bisnis.tempo.co/read/1737291/teten-masduki-luncurkan-perayaan-hari-umkm-nasional-2023-sebut-kontribusi-umkm-terhadap-pdb-60-persen>.
- Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/laporan/laporan-keuangan-pemerintah-pusat>.
- Liyanapathirana, T., & Ranjani, R. P. C. (2017). Cash Management System and Suggestions for Policy Formulation for E-cash management System in Sri Lanka. *Journal of Emerging Trends in Economics and Management Sciences*, 8(1), 75-81. <https://hdl.handle.net/10520/EJC-9b5715e99>.
- Maulid, L. C., & Sudibyo, Y. A. (2020). Kartu Kredit Pemerintah sebagai Alat Pembayaran Belanja Negara di Indonesia: Permasalahan dan Solusi. *Akuntabel*, 17(2), 301-313. <https://doi.org/10.30872/jakt.v17i2.8063>.
- Monginsidi, E. C., Koleangan, R. A., & Rotinsulu, D. C. (2021). ANALISIS IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA MANADO. *JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH*, 20(1), 15-30.

- Mumpuni, M. (2014). Pengantar Pengelolaan Keuangan Negara. Jakarta: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Mubarak, D. A., Akhmad, M. H., & Wati, E. N. (2022). Implementasi Sistem Aplikasi Pembayaran Digital Payment dalam Pelaksanaan Pembayaran Berbasis Cashless di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*, 6(2), 115-122. <https://doi.org/10.31092/jmfp.v6i2.1699>.
- Munik, S. (2022). Tinjauan atas Efektivitas Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah pada KPPN Jambi (Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN). <http://eprints.pknstan.ac.id/id/eprint/668>.
- Muwaffaq, F. A., & Akhmad, M. H. (2022). Pelaksanaan Restrukturisasi dan Pendebitan Rekening Pengeluaran Kas Negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kediri. *Info Artha*, 6(1), 95-112. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JIA/article/view/1691/898>.
- Novitasari, T. & Halim, A. (2020). Analisis Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga di Wilayah Kerja KPPN Magelang). *Accounting and Business Information Systems Journal*, 8(2). <https://doi.org/10.22146/abis.v8i2.58898>.
- Nuranindita, M. (2023). Peran dan Manfaat Marketplace dan Digital Payment dalam Meningkatkan Pemberdayaan UMKM di Provinsi Bangka-Belitung. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 8(1), 17-31. <https://doi.org/https://doi.org/10.33105/itrev.v8i1.590>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian/Lembaga.
- Putra, M. P. S. (2022). Tinjauan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dalam Rangka Pelaksanaan Belanja Negara pada KPPN Tanjungpinang (Doctoral dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN). <http://eprints.pknstan.ac.id/id/eprint/666>.
- Ratmono, Dwi. dan Mahfud Solihin, 2015. "Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual". Penerbit UPP STIM YKPN: Yogyakarta. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1146999>.
- Rosalyni, G. E. N., & Khabibah, N. A. (2020). Penerapan Cash Management System sebagai Sistem Belanja di Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Wilayah Merapi.

- Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi Terapan (JIMAT), 11(2), 139–147. <http://dx.doi.org/10.36694/jimat.v11i2.296>.
- Said, A., & Sutiono, S. (2021). Analisis Persepsi Bendahara Pengeluaran atas Aspek Kepentingan dan Kinerja Pengguna dan Mitra Perbankan dalam Penerapan Kartu Kredit Pemerintah. Jurnal Manajemen Perbendaharaan, 2(1), 17-34. <https://doi.org/10.33105/jmp.v2i1.372>.
- Saputri, A. D. B., & Indrawati, L. R. (2020). Penerapan Cash Management System dalam Bidang Program dan Keuangan Balitbang Kota Magelang. DOI: <https://doi.org/10.1210/.v1i3.31>.
- Sari, I. (2020). Analisis Penerapan Cash Management System dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di PIK Pulogadung. Perspektif: Jurnal Ekonomi dan Manajemen Akademi Bina Sarana Informatika, 18(1), 1-8. DOI: <https://doi.org/10.31294/jp.v18i1.6699>.
- Schlossberger, O., & Soldánová, M. (2022). Cashless Payment System and Covid-19 on the Example of the Czech Republic. Financial Internet Quarterly, 18(1), 31-43. <https://doi.org/10.2478/fiqf-2022-0003>.
- Setiawati, Elsa Pudji (2021). Penyusunan Model. Fakultas Kedokteran Unpad. https://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/09/penyusunan_model.pdf
- Soeriatmadja, Arifin P. (1986). Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Negara Suatu Tinjauan Yuridis. Jakarta:Gramedia. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=455575>.
- Soetrisno PH. Dasar-Dasar Ilmu Keuangan Negara. Yogyakarta: FS-UGM, 1981. Hal 7-8. https://books.google.co.id/books/about/Dasar_dasar_ilmu_keuangan_negara.%20html?id=bsBHAAACAAJ&redir_esc=y.
- Suhyana, F. A., Suseno, S., & Ramli, T. S. (2021). Transaksi Ilegal Menggunakan Kartu ATM Milik Orang Lain. SIGN Jurnal Hukum, 2(2), 138-156. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.92>.
- Sulaeman, A. S., & Dwinanda, R. R. (2021). Manajemen Kas Pemerintah: Implementasi Kartu Kredit Pemerintah dalam Pembayaran Belanja Negara. Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen, 5(2). <https://doi.org/10.33795/jraam.v5i2.005>.
- Suparno, E. (2005). Pengaruh Kompetensi, Motivasi Kerja, dan Kecerdasan Emosional Guru terhadap Kinerja Guru di SMP Negeri Se-Rayon Barat Kabupaten Sragen (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Ulbrich, F. (2003). Introducing a Research Project on Shared Services in Governmental Agencies. <http://nrl.northumbria.ac.uk/policies.html>.
- Ulfie, Izzani, 2020, Tantangan dan Peluang Kebijakan Non-Tunai: Sebuah Studi Literatur. Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis Volume 25 No. 1, April 2020. <http://dx.doi.org/10.35760/eb.2020.v25i1.2379>.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Walley T., Haycox A., Boland A., editors. Pharmacoeconomics. 1 ed. Philadelphia: Churchill Livingstone 2004.

- Wijayanti, F. (2020). Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan serta Meminimalisir Moral Hazard Pengelola Keuangan melalui Implementasi Kartu Kredit Pemerintah. *Otonomi*, 20(2), 267-274. <https://doi.org/10.32503/otonomi.v20i2.1285>.
- Yadnya, I. D. G. S. A. (2022). Pengaruh Persepsi Bendahara Pengeluaran dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(2), 164-170. <https://jii.rivierapublishing.id/index.php/jii/article/view/43>.
- Yulianti, D. (2021). Efektivitas Penerapan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dalam Meningkatkan Transparansi Keuangan Negara pada KPPN Dumai. *Jurnal Optimal*, 18(2), 1-25. <https://jurnal.stieieu.ac.id/index.php/opt/article/view/204>.